

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah pengguna narkoba di Indonesia setiap tahun terus meningkat dimana pada November 2015 jumlahnya mencapai 5,9 juta orang.¹ Jumlah ini meningkat dibanding pada tahun 2014 yang jumlahnya sebanyak 4,2 juta orang. Selain itu, di Indonesia sangat minim tempat rehabilitasi yang hanya bisa menampung 18 ribu orang.²

Tindak pidana narkoba di masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Beberapa materi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

¹ Ira Rachmawati, 11 Januari 2016, *Buwas: Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat Hingga 5,9 Juta Orang*, <http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>

² Fariz Fardianto, 11 Juni 2014, *Pengguna Narkoba di Indonesia pada 2015 Capai 5,8 Juta Jiwa*, <http://www.merdeka.com/peristiwa/pengguna-narkoba-di-indonesia-pada-2015-capai-58-juta-jiwa.html>

Data dan fakta yang terkait dengan penyalahguna narkotika di Indonesia juga sangat memprihatinkan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2011 hingga 2014, menunjukkan tren penyalahgunaan narkoba pada anak-anak di bawah umur mengalami peningkatan sekitar 400 persen. Data tersebut mencakup anak dengan rentang usia dibawah 17 tahun. Fakta tersebut, sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh BNN yang menyebutkan bahwa pada tahun 2014, sebanyak 33 persen pengguna narkoba berada pada usia pelajar dan mahasiswa. Tidak hanya sebagai pemakai, tapi juga pengedar.³

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah merebak hingga ke berbagai daerah di seluruh penjuru wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Malang Jawa Timur. Kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Malang menduduki peringkat ketiga di Jawa Timur. Peringkat pertama masih Kota Surabaya disusul Kabupaten Sidoarjo di peringkat kedua. Kepala BNN Kabupaten Malang, AKBP Basuki Effendi menyampaikan bahwa berdasarkan hasil analisa dan evaluasi jumlah kasus narkotika di Kabupaten Malang termasuk dalam kategori tinggi. Selain menyalahgunakan narkotika, mereka juga gunakan untuk diri mereka sendiri, atau dikonsumsi sendiri. Pemakai narkotika di Kabupaten Malang berada di kisaran usia 35 tahun ke atas. Usia yang sangat rentan disalahgunakan, di usia itu mereka yang umumnya sudah bekerja dan berkecukupan. Karena sudah bekerja sehingga mereka mengkonsumsi narkotika. Tren pemakaian di kalangan pelajar ada tapi jumlah pastinya tidak sebanyak di

³ Elvi dan Risman, 28 April 2015, *Miris, Angka Anak Korban Narkoba Naik 400 Persen*, <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/04/28/26655/25/25/Miris-Angka-Anak-Korban-Narkoba-Naik-400-Persen>

kalangan usia 35 tahun ke atas. Kebanyakan untuk pelajar banyak menyalahgunakan Pil dobel L atau LL. Ke depan, BNN akan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Dinas Pendidikan untuk menekan penggunaan barang haram tersebut di kalangan pelajar.⁴

Generasi muda di Kabupaten Malang yang kesandung masalah narkoba jumlahnya cukup banyak. Sepanjang 2015 misalnya, ada 299 muda-mudi usia mahasiswa ke bawah (pelajar) terdeteksi menyalahgunakan narkoba. Dari angka tersebut, 273 di antaranya menjalani rawat jalan, sedangkan 26 lainnya terpaksa rawat inap karena pecandu kelas berat. Sementara itu untuk pengedar, terdata 73 kasus yang semua bermuara di meja kepolisian. Fakta ini diungkapkan oleh kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Malang, AKBP I Made Arjana. Ini data yang kelihatan, karena pengguna narkoba seperti fenomena HIV/AIDS, sehingga tidak banyak yang mau mengakui karena khawatir dikucilkan.⁵

Salah satu lembaga pemerintah yang bertugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN).⁶ BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

⁴ Malang Times, 12 Agustus 2015, *Kasus Narkotika di Kabupaten Malang Peringkat Ketiga di Jawa Timur*, <http://www.malangtimes.com/baca/2948/20150812/124446/kasus-narkotika-di-kabupaten-malang-peringkat-ketiga-di-jawa-timur/>

⁵ Suharto, 30 Januari 2016, *Ratusan Remaja Kabupaten Terjerat Narkoba*, <http://radarmalang.co.id/ratusan-remaja-kabupaten-terjerat-narkoba-30248.htm>

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, Pasal 2 ayat (1) huruf b.

⁷ *Ibid*, Pasal 1 ayat (1).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya BNN Kabupaten Malang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar?
2. Kendala apa saja yang dihadapi BNN Kabupaten Malang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya BNN Kabupaten Malang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BNN Kabupaten Malang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat atas dilakukannya penulisan ini antara lain:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam studi tentang tinjauan yuridis sosiologis terhadap upaya BNN Kabupaten Malang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.
 - b. Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai aspek yuridis sosiologis atas upaya BNN Kabupaten Malang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar oleh pihak BNN Kabupaten Malang guna meminimalisir jumlah penyalahguna dan efek negatif narkoba di dunia pendidikan.
 - b. Penulis dapat mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh di bangku kuliah di lapangan, khususnya tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yang sesuai untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan mempermudah analisa dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dkonsepskan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.⁸ Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*).⁹ Variabel sosial yang diteliti adalah penyalahgunaan narkoba dan upaya BNN Kabupaten Malang dalam penanggulangan masalah tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penulisan hukum ini, yaitu: BNN Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi ini dikarenakan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Malang tergolong tinggi dan menduduki peringkat ketiga di Provinsi Jawa Timur.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan hukum ini penulis memerlukan 2 (dua) jenis data yang meliputi:

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 133.

⁹ *Ibid*, hal. 134.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berfungsi sebagai data utama, yaitu hasil wawancara peneliti pihak BNN Kabupaten Malang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi. Data dokumentasi berupa hasil penyidikan yang dimiliki oleh BNN Kabupaten Malang terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba oleh para pelajar di Kabupaten Malang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data primer akan dikumpulkan dengan:

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara dengan pihak yang diteliti. Informan yang akan diwawancarai adalah Bapak Bramantio Tri Yoga Adji Laksono selaku Fasilitator Sie Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang.

2) Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara menggandakan, menyalin, atau menfotokopi sejumlah dokumen atau

arsip tertulis dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Data sekunder akan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yaitu: mempelajari sumber data sekunder yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku literatur dan dokumentasi yang sumbernya berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

5. Metode Penentuan Informan

Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan kriteria tertentu, yakni informan yang merupakan Kepala BNN Kabupaten Malang. Teknik ini biasanya dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Informan sebagai sumber primer untuk mendapatkan jawaban atas upaya dan kendala BNN Kabupaten Malang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Informan yang akan diwawancarai adalah Bapak Bramantio Tri Yoga Adji Laksono selaku Fasilitator Sie Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang.

6. Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu analisa dengan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari data primer dan sekunder secara jelas, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai masalah yang ada.¹¹ Berdasarkan data tersebut penulis

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum Sebagai Sebuah Pengantar*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 37

¹¹ *Ibid*, hlm. 65

dapat melakukan analisis yuridis kriminologis tentang upaya dan kendala yang dihadapi oleh BNN Kabupaten Malang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sedermikian rupa sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan tinjauan umum tentang penanggulangan kejahatan, penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan pelajar.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasannya mengenai upaya BNN Kabupaten Malang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan upaya tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penulisan disertai saran dari penulis.